

ANALISIS HAMBATAN KOLABORASI PEMERINTAH PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEOPARK DIENG

Yasmin Wulansari¹, Laila Kholid Al Firdaus²

Email: yasminwulansari1203@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139 Telepon (024) 7465407
Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan Geopark Dieng merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan konservasi kawasan berbasis pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan Geopark Dieng melibatkan banyak aktor lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga menuntut adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholder*. Dalam praktiknya, kolaborasi tersebut menghadapi berbagai hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash serta teori *Stakeholder Salience* dari Mitchell, Agle, dan Wood. Hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan antar level pemerintahan, perbedaan tingkat kepentingan antar *stakeholder*, serta variasi tingkat urgensi dalam memandang kebijakan geopark. Ketimpangan kekuasaan menyebabkan proses pengambilan keputusan cenderung bersifat hierarkis, sementara perbedaan kepentingan dan urgensi berdampak

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

pada lemahnya koordinasi, konsistensi implementasi, serta lambatnya penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian tujuan kebijakan konservasi Geopark Dieng secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kata kunci: kolaborasi, kebijakan publik, geopark, Geopark Dieng, *collaborative governance*.

ABSTRACT

The Dieng Geopark policy represents a governmental effort to promote area conservation through sustainable tourism by integrating conservation, education, and community economic development. However, the implementation of the Dieng Geopark policy involves multiple actors across sectors and administrative regions, thereby requiring effective collaboration among stakeholders. In practice, such collaboration faces various barriers that have the potential to affect policy effectiveness. This study aims to analyze the barriers to collaboration in the implementation of the Dieng Geopark policy and to examine their implications for the effectiveness of conservation policy. The research adopts a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using the Collaborative Governance framework proposed by Ansell and Gash and the Stakeholder Salience theory developed by Mitchell, Agle, and Wood. The findings indicate that barriers to collaboration in the implementation of the Dieng Geopark policy are influenced by power imbalances among different levels of government, differences in stakeholder interests, and variations in perceived urgency toward the geopark policy. Power imbalances result in a predominantly hierarchical decision-making process, while differences in interests and urgency contribute to weak coordination, inconsistent implementation, and slow translation of policy into concrete actions on the ground. These barriers ultimately lead to the suboptimal achievement of integrated and sustainable conservation objectives within the Dieng Geopark policy.

Keywords: *collaboration, public policy, geopark, Dieng Geopark, collaborative governance.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam berbasis konservasi di Indonesia menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aktor non-

pemerintah. Kompleksitas ini semakin meningkat dalam konteks pengembangan geopark yang mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat secara simultan.

Geopark Dieng merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki potensi geologi, biodiversitas, serta budaya yang tinggi. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang konservasi dan edukasi berbasis masyarakat. Namun, implementasi kebijakan Geopark Dieng menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder*.

Kondisi geografis yang melibatkan dua wilayah administratif, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, memperumit proses implementasi kebijakan. Perbedaan kepentingan, kewenangan, serta kapasitas antar pemerintah daerah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi.

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teknis dan potensi geowisata, sementara kajian mengenai hambatan kolaborasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan konservasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan dalam pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam suatu forum bersama yang bersifat deliberatif dan konsensus (Ansell & Gash, 2008). Model ini terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaboratif, dan hasil sementara.

Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan kebijakan. Namun, keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada keseimbangan kekuasaan dan kesamaan kepentingan antar aktor.

Stakeholder Salience Theory

Teori *stakeholder salience* yang dikembangkan oleh Mitchell, Agle, dan Wood (1997) menjelaskan bahwa pentingnya suatu *stakeholder* ditentukan oleh tiga atribut utama, yaitu kekuasaan (power), kepentingan (interest), dan urgensi (urgency).

Ketiga atribut ini memengaruhi tingkat pengaruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, perbedaan atribut tersebut dapat menjadi sumber konflik dan hambatan dalam kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada di kawasan Geopark Dieng yang meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai *stakeholder*, dokumentasi, serta

studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengacu pada kerangka *collaborative governance* dan *stakeholder salience theory*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap kondisi awal (starting conditions)

Ditemukan adanya ketimpangan kapasitas dan sumber daya antar *stakeholder* yang terlibat. Pemerintah provinsi memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah kabupaten maupun aktor lokal lainnya. Ketimpangan ini menciptakan asimetri kekuasaan yang berdampak pada posisi tawar masing-masing aktor dalam proses kolaborasi. Selain itu, perbedaan pengalaman dan kesiapan institusional juga memengaruhi dinamika interaksi antar *stakeholder*. Aktor yang memiliki kapasitas lebih tinggi cenderung lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan, sementara aktor lain berada pada posisi yang lebih pasif. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sejak awal, kolaborasi tidak dibangun dalam posisi yang setara, sehingga berpotensi menghambat terciptanya proses deliberatif yang inklusif sebagaimana yang diharapkan dalam *collaborative governance*.

Desain kelembagaan (institutional design)

Struktur organisasi dalam pengelolaan Geopark Dieng sebenarnya telah terbentuk, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan koordinasi lintas wilayah. Dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan pembagian peran antar *stakeholder*. Selain itu, mekanisme koordinasi yang ada masih bersifat normatif dan belum terinstitusionalisasi secara operasional. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak konsisten antar wilayah dan cenderung bergantung pada inisiatif masing-masing aktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan belum

berfungsi secara optimal sebagai instrumen integratif dalam mendukung kolaborasi.

Aspek kepemimpinan fasilitatif (facilitative leadership)

Peran aktor yang seharusnya menjadi penggerak kolaborasi belum berjalan secara maksimal. Kepemimpinan yang ada masih cenderung bersifat administratif dan belum mampu menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani perbedaan kepentingan antar *stakeholder*. Ketiadaan mediator yang efektif menyebabkan komunikasi antar aktor tidak berjalan secara optimal, sehingga proses penyatuan persepsi menjadi terhambat. Dalam konteks *collaborative governance*, kepemimpinan yang fasilitatif seharusnya mampu membangun kepercayaan dan menciptakan ruang dialog yang inklusif, namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng.

proses kolaboratif (*collaborative process*), interaksi antar *stakeholder* memang telah berlangsung, namun masih bersifat

formalistik dan belum didukung oleh tingkat kepercayaan yang memadai. Proses komunikasi yang terjadi lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif daripada membangun kesepahaman substantif. Selain itu, kurangnya intensitas komunikasi dan minimnya transparansi informasi turut menghambat terbentuknya trust antar *stakeholder*. Akibatnya, kolaborasi tidak berkembang menjadi proses yang dinamis, melainkan cenderung stagnan dan berjalan secara sektoral.

Kondisi tersebut tercermin pada hasil sementara kolaborasi (*intermediate outcomes*) yang belum menunjukkan capaian yang signifikan. Implementasi kebijakan Geopark Dieng masih menghadapi kendala dalam koordinasi lintas wilayah, lambatnya realisasi program, serta belum terwujudnya integrasi kebijakan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang berlangsung belum mampu menghasilkan output yang efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Untuk memperdalam analisis hambatan kolaborasi, penelitian ini juga menggunakan perspektif *stakeholder salience* dari Mitchell, Agle, dan Wood (1997) yang menyoroti tiga atribut utama, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan urgensi. Dari aspek kekuasaan (*power*), ditemukan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antar *stakeholder*, di mana aktor dengan kekuasaan lebih besar cenderung mendominasi proses pengambilan keputusan. Dominasi ini menyebabkan partisipasi aktor lain menjadi terbatas, sehingga kolaborasi tidak berjalan secara setara. Selain itu, ketimpangan kekuasaan juga berpotensi menimbulkan ketergantungan pada aktor dominan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas kolaborasi.

Kepentingan (*interest*)

Perbedaan orientasi antar *stakeholder* menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kolaborasi. Pemerintah daerah cenderung lebih berfokus pada

pengembangan ekonomi dan pariwisata, sementara aktor lain menekankan pentingnya konservasi lingkungan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan konflik yang bersifat laten dan menyulitkan proses penyatuan visi dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya mekanisme yang mampu menyelaraskan kepentingan tersebut, kolaborasi menjadi tidak terarah dan cenderung berjalan secara parsial.

Aspek urgensi (urgency)

Terdapat variasi tingkat kepentingan antar *stakeholder* dalam memandang kebijakan Geopark Dieng. Tidak semua aktor menganggap kebijakan ini sebagai prioritas utama, sehingga tingkat komitmen yang ditunjukkan juga berbeda-beda. Aktor yang memiliki urgensi tinggi cenderung lebih aktif dalam proses kolaborasi, sementara aktor lain menunjukkan keterlibatan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan partisipasi dan memperlambat proses implementasi kebijakavn.

Hambatan-hambatan tersebut secara keseluruhan berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan Geopark Dieng. Lemahnya koordinasi antar *stakeholder* menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak sinkron, terutama dalam konteks lintas wilayah antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, perbedaan kepentingan dan urgensi juga memicu inkonsistensi dalam pelaksanaan program, sehingga kebijakan yang telah dirumuskan tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan.

Hambatan kolaborasi yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan relasional. Ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta variasi tingkat urgensi menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya kolaborasi yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Geopark Dieng masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif yang ideal, sehingga berdampak pada belum

optimalnya pencapaian tujuan konservasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Efektivitas Kebijakan Geopark Dieng

Hambatan kolaborasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng tidak hanya berdampak pada proses interaksi antar *stakeholder*, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi atau program yang telah dirancang, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan di lapangan.

Pertama, hambatan kolaborasi berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar *stakeholder*, khususnya dalam konteks lintas wilayah antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Ketimpangan kekuasaan serta ketidakjelasan peran antar aktor menyebabkan proses koordinasi tidak

berjalan secara optimal. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung berjalan secara parsial dan tidak sinkron antar wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang tidak efektif berkontribusi pada fragmentasi kebijakan, sehingga tujuan bersama sulit untuk dicapai secara kolektif.

Kedua, perbedaan kepentingan antar *stakeholder* berimplikasi pada munculnya inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Aktor yang memiliki orientasi kepentingan berbeda cenderung menjalankan kebijakan sesuai dengan prioritas masing-masing, sehingga tidak terdapat keseragaman dalam pelaksanaan program. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan arah kebijakan dan mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan konservasi yang terintegrasi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ketiga, variasi tingkat urgensi antar *stakeholder* berdampak pada rendahnya komitmen kolektif dalam implementasi

kebijakan. Tidak semua aktor memandang kebijakan Geopark Dieng sebagai prioritas utama, sehingga tingkat partisipasi dan keterlibatan yang ditunjukkan menjadi tidak merata. Hal ini menyebabkan proses implementasi berjalan lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Rendahnya sense of urgency ini juga memperlemah kohesi dalam kolaborasi, sehingga sulit untuk membangun sinergi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, hambatan kolaborasi juga berimplikasi pada lambatnya penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan secara formal, namun tanpa dukungan kolaborasi yang efektif, implementasi kebijakan menjadi tidak optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya pengembangan Geopark Dieng sebagai kawasan konservasi berbasis pariwisata berkelanjutan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang (policy design) dengan realisasi di lapangan (policy implementation).

Secara konseptual, temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam membangun kolaborasi yang efektif akan berdampak langsung pada rendahnya kualitas tata kelola kebijakan (governance quality). Dalam perspektif good governance, kolaborasi yang lemah mencerminkan belum optimalnya prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi antar aktor. Hal ini pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dari kebijakan geopark.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan kolaborasi dalam implementasi kebijakan Geopark Dieng memiliki implikasi yang bersifat sistemik, yaitu melemahkan koordinasi, menimbulkan inkonsistensi implementasi, memperlambat proses kebijakan, serta menghambat pencapaian tujuan konservasi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kolaborasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas

kebijakan dan memastikan keberhasilan pengelolaan Geopark Dieng ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Geopark Dieng belum sepenuhnya berjalan secara optimal akibat adanya hambatan dalam proses kolaborasi antar *stakeholder*. Analisis menggunakan kerangka *collaborative governance* menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbentuk masih menghadapi kendala pada berbagai dimensi, mulai dari kondisi awal yang tidak setara, desain kelembagaan yang belum integratif, kepemimpinan yang belum fasilitatif, hingga proses kolaboratif yang belum berjalan secara efektif.

Selain itu, analisis menggunakan *stakeholder salience theory* mengungkapkan bahwa hambatan kolaborasi dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta variasi tingkat urgensi antar *stakeholder*. Ketimpangan kekuasaan menyebabkan

dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan, sementara perbedaan kepentingan dan urgensi menghambat penyatuan visi dan komitmen kolektif dalam implementasi kebijakan.

Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada lemahnya koordinasi lintas wilayah, inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, serta lambatnya penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Akibatnya, tujuan kebijakan Geopark Dieng dalam mewujudkan konservasi berbasis pariwisata berkelanjutan belum tercapai secara optimal dan terintegrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Geopark Dieng sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antar *stakeholder*. Tanpa adanya penguatan kolaborasi yang efektif, kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mampu menghasilkan dampak yang signifikan dalam praktiknya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Geopark Dieng.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat peran sebagai fasilitator kolaborasi dengan menciptakan ruang dialog yang inklusif dan partisipatif bagi seluruh *stakeholder*. Peran ini penting untuk menjembatani perbedaan kepentingan serta membangun kepercayaan antar aktor.

Kedua, diperlukan penguatan desain kelembagaan yang lebih integratif dan operasional, khususnya dalam hal pembagian peran dan kewenangan antar *stakeholder*. Kejelasan struktur kelembagaan akan membantu meningkatkan koordinasi lintas wilayah dan mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan.

Ketiga, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Hal

ini penting untuk menciptakan kesepahaman bersama dalam implementasi kebijakan.

Keempat, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan kepentingan antar *stakeholder* melalui mekanisme koordinasi yang efektif. Penyatuan visi ini menjadi kunci dalam menciptakan kolaborasi yang solid dan berorientasi pada tujuan bersama.

Kelima, pemerintah dan *stakeholder* terkait perlu meningkatkan kesadaran akan urgensi kebijakan Geopark Dieng sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya sense of urgency, diharapkan komitmen dan partisipasi *stakeholder* dalam implementasi kebijakan juga akan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public*

Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.

UNESCO. (2015). *Global Geoparks Network guidelines and criteria*. Paris: UNESCO.

Zhou, X., et al. (2015). Geoheritage and geoparks: Concepts and development. *International Journal of Geoheritage*, 3(2), 1–10.